

Judul : SBY: KPK punya banyak musuh
Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

REPUBLICA KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017

Nasional 3

SBY: KPK Punya Banyak Musuh

● DIAN FATH RISALAH, KABUL ASTUTI

Pansus akan temui Jokowi

JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas yang berat serta tantangan yang besar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bahkan, menurut presiden Ke-6 RI tersebut, dalam memberantas korupsi pun KPK banyak memiliki musuh.

"Rakyat tahu KPK punya misi yang besar dan tantangan besar, musuhnya banyak," ujar SBY dalam sambutannya di diskusi yang dilakukan antara tim pencegahan KPK dan Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/9) sore.

Dalam sambutannya, SBY pun menyambut positif prakarsa yang dilakukan KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam melakukan kajian untuk membangun politik yang berintegritas. SBY pun menyadari, tugas KPK adalah memberantas dan menyembuhkan penyakit politik dan demokrasi yang sebagian besar diidap oleh partai politik dan para penyelenggara negara.

"Saya percaya Ibu Basaria (KPK), teman-teman kita, memiliki komitmen yang sama, adalah negara ini makin ke depan makin bersih," tutur SBY.

SBY pun meminta agar seluruh jajaran KPK tetap kuat, tegar, serta terjaga integritasnya, adil dalam memproses kasus korupsi. "Tolak segala intervensi dari mana pun, termasuk yang disebut *obstruction of justice*, karena *obstruction of justice* itu dalam undang-undang kita itu mendapatkan sanksi hukum yang berat," paparnya.

Pada kesempatan itu SBY menegaskan, partainya akan terus mendukung penuh KPK dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut meski beberapa kader Partai Demokrat juga ada yang terlibat korupsi. "Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK," kata SBY.

Terlebih, sempat muncul ide untuk membekukan KPK. "Kalau itu untuk melemahkan, rakyat tahu kita tahu. Demokrat menolak pelemahan KPK, apalagi kalau ada yang ingin membekukan dan membubarkan KPK," ucapnya.

Setelah menyampaikan sambutannya, KPK dan para pengurus DPP Partai Demokrat langsung melakukan diskusi terkait sistem integritas partai politik dalam mencegah korupsi secara tertutup. KPK berharap dalam diskusi tersebut bisa muncul berbagai rekomendasi, baik dari KPK maupun dari Partai Demokrat.

Adapun jadwal kunjungan tim pencegahan KPK ke sejumlah partai yang telah dilakukan adalah ke PDIP pada 31 Agustus 2017, Gerindra pada 7 September 2017, PKB pada 7 September 2017, Hanura pada 11 September 2017, lalu pada Rabu kemarin ke Partai Demokrat dan Nasdem.

Temui Jokowi

Pansus Hak Angket KPK meminta kesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi, menyatakan, tujuan pansus ingin bertemu dengan Pre-

siden Joko Widodo adalah dalam rangka konsultasi.

"Kami telah meminta kepada pimpinan DPR untuk menyurati Presiden agar pansus bisa berkonsultasi dalam rangka konsultasi dengan Presiden," kata Taufiqulhadi. Taufiqulhadi mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan dalam konteks hubungan antarlembaga. Di antaranya membahas tentang tujuan pansus dan apa yang telah dilakukan pansus selama ini. Pansus berharap dapat mengomunikasikan langsung hal-hal yang belum sampai kepada Jokowi dalam konsultasi tersebut.

Politisi Nasdem ini juga membantah pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka melobi Presiden atau upaya agar pemerintahan mau mengikuti rekomendasi pansus. Ia yakin Presiden mempunyai pandangan sendiri. "Ah, tidak ada itu, karena saya yakin Presiden ada perspektif sendiri. Jadi, ini dalam rangka konsultasi biasa saja," ucapnya.

Taufiq menyangkal dengan mengatakan, permintaan bertemu dengan Jokowi tidak akan diungkapkan terbuka kalau memang ada upaya lobi. "Kalau lobi itu, menurut saya, tidak selalu harus seperti itu. Karena, kalau lobi itu, kalau memang ada, tidak harus terbuka," imbuhnya.

Untuk diketahui, sejumlah nama kader Partai Demokrat sudah dipidanakan oleh KPK lantaran korupsi. Di antaranya, mantan menpora Andi Mallarangeng, mantan anggota DPR Angelia Sondakh, Sutan Bathogana, M Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum.

■ ed: muhammad hafid